

**MANAJEMEN PEMERINTAHAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN DALAM PROGRAM BANTUAN
RUMAH SEHAT LAYAK HUNI DI KECAMATAN UKUI TAHUN 2018**

Oleh : Nur Fitri

Email : nurfitri06051998@gmail.com

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Email : adlinoke@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km.12.5 Simp. Pekanbaru Baru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal merupakan hak setiap warganegara, karena dijamin oleh UUD 1945 pada Pasal 28H Ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan ini Pemerintah memberikan program rumah sehat layak huni bagi masyarakat miskin yang belum atau sudah memiliki rumah namun belum layak huni di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Masalah dari penelitian ini adalah program ini tidak tepat sasaran dikarenakan penerima program masih termasuk masyarakat yang mampu, selain itu dalam segi pembangunannya melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu 90 hari kerja atau selama tiga bulan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen pemerintahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan dalam program bantuan Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Ukui serta faktor-faktor penghambat manajemen pemerintahan dalam program bantuan Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Ukui. Dalam penelitian ini menggunakan teori Manajemen Pemerintahan Zaidan Nawawi. Dimana menurut Zaidan Nawawi ada lima aspek manajemen yaitu, *Planning, Organizing, Coordinating, Actuating, Controlling*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum maksimal dalam pelaksanaan program bantuan Rumah Sehat Layak Huni. Program ini masih kurang tepat sasaran yang seharusnya mendapatkan tidak mendapatkan dan yang seharusnya tidak mendapatkan justru mendapatkan. Dinas PUPR harus lebih selektif lagi dalam memverifikasi data penerima program agar program ini sesuai dengan tujuan awalnya yaitu membantu masyarakat miskin agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Kata Kunci: Manajemen Pemerintahan, Program, Rumah Layak Huni

**GOVERNMENT MANAGEMENT BY THE PELALAWAN REGENCY PUBLIC WORKS
AND SPATIAL PLANNING SERVICE IN THE ASSISTANCE PROGRAM FOR HEALTHY
HOMES FOR LIVING IN UKUI DISTRICT IN 2018**

By: Nur Fitri

Email : nurfitri06051998@gmail.com

Supervisor: Adlin, S.Sos, M.Si

Email : adlinoke@gmail.com

Department of Government Science

Faculty of Social and Political Sciences, University of Riau

Bina Widya Campus, Jl. H.R. Soebrantas Km 12.5 Simp. New, Pekanbaru 28293

Phone/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Fulfilling the need for a place to live is the right of every citizen, because it is guaranteed by the 1945 Constitution in Article 28H Paragraph 1 which states that "everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to live, and to have a good and healthy living environment and the right to health services. The government hereby provides a program of healthy, livable houses for the poor who do not have or already own a house but are not yet livable in Ukui Sub-district, Pelalawan Regency. The problem with this research is that this program is not right on target because the program recipients are still well-off people, besides that in terms of development, it exceeds the predetermined time limit, which is 90 working days or for three months. The purpose of this study is to find out government management by the Public Works and Spatial Planning Department of Pelalawan Regency in the Healthy Homes for Living Assistance program in Ukui District and the inhibiting factors for Government management in the Healthy Homes for Liveable Assistance programs in Ukui District. In this study using the theory of Government Management Zaidan Nawawi. Where according to Zaidan Nawawi there are five aspects of management, namely, Planning, Organizing, Coordinating, Actuating, Controlling. This study uses research methods with qualitative research approaches and types. This research was conducted at the Department of Public Works and Spatial Planning, Pelalawan Regency. Data collection techniques by means of interviews and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the Department of Public Works and Spatial Planning has not been maximized in the implementation of the Decent Healthy Home assistance program. This program is still not right on target, those who should get it don't get it and those who shouldn't get it actually get it. The PUPR office must be more selective in verifying program recipient data so that this program is in line with its original goal of helping the poor to get a better life.

Keywords: *Government Management, Programs, Livable Houses*

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal merupakan hak setiap warga negara, karena dijamin oleh UUD 1945 pada Pasal

Lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah dengan layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman dan harmonis.

Dengan itu Pemerintah mengadakan Program bantuan Rumah Sehat Layak Huni yang di gagas oleh pemerintah pusat ini dananya bersumber dari APBN dan di kelola oleh dinas PUPR masing masing daerah. Yang mana pemerintah menyerahkan program rumah sehat layak huni ini kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan maskimal mengenai program ini, pemerintah daerah dibantu dengan pemerintah Kabupaten/Kota bekerja sama supaya program ini sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah pusat.

Dalam pembangunan program Rumah Sehat Layak Huni Dinas PUPR melalui Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman menangani pembangunan bangunan gedung pemerintahan dan pembangunan infrastruktur permukiman kabupaten.

Berikut adalah tabel data warga miskin di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan pada tahun 2018 berdasarkan data BDT (Basis Data Terpadu).

Tabel 1

28H Ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

Jumlah orang miskin berdasarkan BDT (Basis Data Terpadu)

NO	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah
1	Air Mas	165 KK
2	Air Hitam	299 KK
3	Bagan Limau	69 KK
4	Bukit Gajah	74 KK
5	Bukit Jaya	115 KK
6	Kampung Baru	159 KK
7	Lubuk Kembang bunga	429 KK
8	Lubuk Kembang Sari	136 KK
9	Silikuan Hulu	175 KK
10	Tri Mulya Jaya	98 KK
11	Ukui Dua	151 KK
12	Kelurahan Ukui	335 KK

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan jumlah data warga diatas berikut adalah jumlah data warga yang mendapatkan program bantuan rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di 3 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Tabel 2
Data penerima Program Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Ukui Tahun 2018

No	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah
1	Kelurahan Ukui	21 UNIT RUMAH
2	Desa Bukit Gajah	15 UNIT RUMAH
3	Desa Bukit Jaya	15 UNIT RUMAH
4	Lubuk Kembang Sari	15 UNIT RUMAH

Sumber Data: TKS Kecamatan Ukui

Setiap warga yang mendapatkan program bantuan rumah ini mendapatkan dana sebesar antara 57.500,00 setiap satu unit rumah, dana ini sudah termasuk untuk membayar upah pekerja dan juga digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan yang di beli di toko bangunan terdekat. Tujuan program ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera.
2. Untuk membantu masyarakat miskin yang sudah memiliki tanah dan ada sertifikatnya sehingga bisa mendapatkan bantuan Rumah Sehat Layak Huni.
3. Membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal.
4. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan memberikan kehidupan yang layak, hidup bersih dan sehat sehingga manfaat bantuan tersebut dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu atau keluarga tidak juga mencakup aspek fisik, tetapi juga mental sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung. Secara mental memenuhi rasa kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan mencapai ketahanan negara.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin, tidaklah hanya sebagai stasiun atau tempat

singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi titik mental sosial, ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan dengan pendapatan dan pengetahuan fungsi rumah itu sendiri.

Indikator penerima program bantuan rumah sehat layak huni berdasarkan PERMENSOS RI Nomor 20 Tahun 2017 adalah:

a. Rumah Layak Huni

Berikut adalah Kriteria yang bisa mendapatkan program bantuan rumah sehat layak huni, sebagai berikut:

1. Dinding dan/atau atap dalam kondisi buruk yang dapat membahayakan keselamatan penghuni
2. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk
3. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak
4. Luas lantai kurang dari 7,2 m/orang (tujuh koma dua meter persegi per orang).

b. Fakir Miskin

1. Fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin
2. Belum pernah mendapat bantuan sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
3. Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga
4. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau garik atau surat keterangan kepemilikan dari camat.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Manajemen Pemerintahan oleh Dinas PUPR dalam program bantuan Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja faktor penghambat Manajemen Pemerintahan dalam program Rumah

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Manajemen Pemerintahan dalam program bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Manajemen Pemerintahan dalam program bantuan Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu contoh acuan penulisan terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa skripsi dengan penelitian yang dilakukan penulis:

1. Penelitian dilakukan oleh (Angela Riazna Putri, 2014). Evaluasi Program Bedah Rumah Di Kecamatan Pangkalan Kuras Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 – 2016.
2. Penelitian dilakukan oleh (Ruvi Indayu, 2014). Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Di Kecamatan Tebing Tahun 2012.
3. Penelitian dilakukan oleh (Anton Firdaus, 2017). Pelaksanaan Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Oleh Pemerintah Desa Palas Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2016.
4. Penelitian dilakukan oleh (Rindo Afandi). Implementasi Program Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatra Utara.
5. Penelitian dilakukan oleh (Siska Indriyani Samosir). Implementasi

Kerangka Teori

a. Manajemen

Menurut **Djuroto (2004 : 95)** manajemen didefinisikan sebagai proses karena dalam mencapai tujuan menggunakan serangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Serangkaian kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi.

Menurut Melayu S.P Hasibuan Manajemen merupakan suatu proses yang khas dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber sumber daya lainnya.

b. Manajemen Pemerintahan

Menurut Zaidan Nawawi (2015: 37), manajemen pemerintahan terdiri dari 5 aspek yaitu:

1. *Planning* (Perencanaan)
Merupakan kegiatan yang sudah diputuskan dengan menentukan apa – apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah rencana pasti memerlukan masukan dari berbagai sumber informasi antara lain dari kegiatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan diwaktu sebelumnya.
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
Meliputi penentuan dan pembentukan wadah atau organisasi serta peraturan hubungan antara wadah wadah tersebut. Prinsip organisasi yang penting adalah pembagian kerja, pendelegasian wewenang dan koordinasi yang dilakukan dalam organisasi.
3. *Coordinating* (Koordinasi)

Merupakan fungsi manajemen yang melakukan berbagai kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

4. *Actuating* (Pelaksanaan)

Fungsi pelaksanaan (*actuating*) dari manajemen sulit sekali mencapai hasil seperti dikehendaki, betapa pun pelaksanaan suatu kegiatan itu dapat dilakukan secara tuntas. Misalnya saja kegiatan pembangunan suatu gedung untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, bisa saja semua dana atau anggaran yang disediakan dapat tepat waktu untuk keperluan yang dimaksudkan, tetapi hasil dan manfaatnya bisa saja tidak menemui sasaran yang diharapkan karena buruknya proses perencanaan yang tidak melibatkan *stakeholder* yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut

5. *Controlling* (Pengawasan)

Merupakan suatu fungsi yang didalamnya termasuk mengendalikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana, mengukur hasil dibandingkan dengan target atau rencana, melakukan tindakan atas terjadinya penyimpangan dan menyusun *feed-back* demi penyempurnaan dimasa yang akan datang. Hasil pengawasan ini yang kemudian akan digunakan sebagai bahan oleh pihak manajemen dalam hal ini mengambil keputusan (*policy making process*) untuk perumusan dan perencanaan suatu kegiatan berikutnya.

c. Program

Charles O Jones (1996: 295) dalam bukunya *public policy* menjelaskan program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, kebijakan kebijakan, prosedur

prosedur, peraturan peraturan, pemberian tugas, langkah langkah yang harus di ambil, sumber sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu.

d. Rumah Layak Huni

Dalam banyak istilah rumah lebih digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat fisik (*house, dwelling, shelter*) atau bangunan untuk tempat tinggal/bangunan pada umumnya (seperti gedung dan sebagainya). Jika ditinjau secara lebih dalam rumah tidak sekedar bangunan melainkan konteks sosial dari kehidupan keluarga dimana manusia saling mencintaidan berbagi dengan orang orang terdekatnya.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan secara alamiah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya rekayasa dan jenis data yang dikumpulkan berupa data deskriptif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut (Vreswell, 2016) penelitian kualitatif merupakan metode metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang di anggap berasal dari masalah sosial

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian penulis dilakukan di Dinas PUPR dan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang Manajemen Pemerintahan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Dalam Program

Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) di Kecamatan Ukui.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari pihak – pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan Manajemen Pemerintahan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Dalam Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Di Kecamatan Ukui.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk yang sudah berbentuk naskah tertulis

atau dokumen, buku buku, dan penelitian terdahulu. Data yang diperoleh dalam rangka mendukung dan mencari jawaban pertanyaan – pertanyaan penelitian.

5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang menjadi sumber data didalam penelitian yang berhubungan langsung dengan permasalahan dan mampu memberikan informasi yang akurat kepada peneliti. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 3
Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Jumlah
1.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman Dinas PUPR	Bapak Thomas	1
2.	Kepala Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan Ukui	Bapak Sukamat	1
3.	Ketua LPM	Bapak Hadi	1
4.	Kepala Desa	1. Bapak Taryam 2. Bapak Sugino	2
5.	Masyarakat	1. Bapak Sarudin 2. Bapak Injil 3. Bapak Irep 4. Bapak Haris	4

6. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pengamatan.
2. Wawancara. Wawancara penelitian dilakukan dengan menanyakan secara langsung dengan informan, yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar tentang Manajemen Pemerintahan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni

3. Dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Penelitian yang dibantu oleh dokumentasi yaitu menggunakan kamera foto dan alat perekam suara.

7. Teknik Analisis Data

Adapun jenis data yang terkumpul akan dianalisis melalui tahap pertama yakni pengumpulan data berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif kemudian tahap kedua yakni reduksi data berarti

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru);
Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Pelalawan adalah nama sebuah Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Pelalawan adalah nama sebuah Kerajaan Melayu. Wilayah kerajaan ini berada di bagian hilir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachruddin (1811-1822). Berdasarkan cerita dahulunya nama Sungai Kampar adalah Laut Ombun.

2. Letak Geografis dan Iklim

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur Pulau Sumatra antara 1,25 Lintang Utara sampai 0,20 Lintang Selatan dan antara 100,40 Bujur Timur sampai 103,28 Bujur Timur dengan batas wilayah:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak; Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur)

Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Ketamen, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Peny, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Sinngingi);

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Pemerintahan oleh Dinas PUPR dalam program bantuan Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan masih banyak terdapat jumlah penduduk yang miskin atau kurang mampu. Dengan adanya program pemerintah mengenai program bantuan rumah sehat layak huni ini sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal namun belum layak huni. program rumah layak huni memang di peruntukkan untuk masyarakat yang benar benar rumah nya tidak layak sehingga perlu mendapat program bantuan rumah ini agar kehidupannya lebih nyaman dan kehidupan bisa lebih layak.

Perlu dicermati bahwa pada bagian ini penulis akan menjabarkan bagaimana kegiatan manajemen Pemerintahan oleh dinas PUPR dalam program bantuan rumah sehat layak huni di kecamatan ukui kabupaten pelalawan serta faktor penghambat dalam pelaksanaan program bantuan rumah sehat layak huni di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Berikut ini alur proses/tahapan untuk kegiatan program bantuan rumah sehat layak huni secara sederhana yang dilakukan yaitu :

1. *Planning* (Perencanaan) Program Rumah Sehat Layak Huni (RSLH)

Perencanaan merupakan hal yang paling utama dilakukan dalam pelaksanaan prinsip

dan fungsi manajemen, karena dalam perencanaan ini lah dibentuk tujuan bersama yang ingin dicapai oleh suatu organisasi termasuk organisasi pemerintah. Perencanaan dalam manajemen pemerintahan adalah proses penetapan sasaran dan pemilihan cara untuk mencapai sasaran tersebut.

sebelum memberikan program bantuan rumah RSLH sudah dilakukan survei terlebih dahulu untuk mencari orang-orang yang memang layak mendapatkan program ini yang sesuai dengan syarat dan kriteria yang sudah ditentukan. Yang mana syarat utama penerima program bantuan Rumah Sehat Layak Huni ini adalah masyarakat miskin yang sudah memiliki atau belum memiliki rumah namun tidak layak huni atau dibawah standar kelayakan hidup sehat, syarat lainnya adalah penerima program ini harus memiliki tanah sendiri tidak tanah sengketa atau tanah sewa. Agar setelah dilakukan pembangunan diatas tanah tersebut tidak menimbulkan masalah yang bisa merugikan pihak manapun.

Proses calon penerima bantuan program Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Ukui, instansi-instansi yang terlibat di Kecamatan Ukui berembuk bersama seperti Lurah, Kepala Desa, RT, RW, LPM, dan Tokoh-tokoh Masyarakat dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan Rumah Sehat Layak Huni. Dengan kategori kemiskinan dan pendapatan masyarakat kemudian menentukan dengan syarat-syarat umum calon penerima bantuan yang telah ditentukan, apakah penerima bantuan sudah termasuk kategori yang telah ditentukan. Sehingga masyarakat di Kecamatan Ukui yang mendapatkan bantuan rumah sehat layak huni memang dikategorikan orang-orang kurang mampu.

c. Pengorganisasian Struktur Pemerintahan

Struktur ialah hubungan relatif tetap sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan sumber daya manusia. Struktur adalah cara unik suatu organisasi menyusun orang-orang nya untuk menciptakan sebuah organisasi. Struktur organisasi merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan diantara fungsi – fungsi dalam suatu organisasi serta wewenang dan tanggungjawab setiap anggota organisasi yang menjalankan masing-masing tugasnya. Setiap susunan kerja sudah teratur dan terorganisir. Organisasi itu bulat, didalam organisasi ada organisasi lagi, kalau tidak ada yang menopang maka tidak akan berdiri sebuah organisasi tersebut.

c. Coordinating (Koordinasi)

Coordinating merupakan suatu usaha menyelenggarakan pertemuan yang dapat menstimulasi pekerjaan. Usaha ini dilakukan pimpinan dalam rangka penjalinan hubungan dan penyelenggaraan komunikasi. Penjalinan hubungan atau koordinasi adalah menggerakkan suatu organisasi atau kelompok, dengan menjalin hubungan pimpinan dan bawahan akan saling hubungkan agar mencegah terjadinya kekacauan. Selanjutnya penyelenggara komunikasi yang merupakan suatu proses yang mempengaruhi seluruh proses kegiatan yang termasuk dalam kesamaan arti organisasi dapat berinteraksi dengan baik untuk mencapai sasaran yang efektif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman, Bapak Thomas di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, mengatakan bahwa:

“Menegenai program ini kita selalu koordinasi dengan pihak kecamatan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), karena TKSK sendiri yang menjadi pedamping tentunya mengetahui kondisi baik wilayah yang menjadi tugasnya maupun para penerima RSLH. (Wawancara Hari Selasa, 27 Oktober 2020, Pukul 14: 00WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa koordinasi berjalan dengan baik antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Begitu juga koordinasi dengan RT, RW, Kelurahan berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan pembangunan program Rumah Sehat Layak Huni berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

d. Actuating (Penggerakan atau Pelaksanaan)

Menggerakan (actuating) berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya merupakan pusat aktivitas-aktivitas manajemen. Arti penting sumber daya manusia bagi perusahaan terletak pada kemampuan untuk berinteraksi sukarela dan secara positif melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan.

Diketahui bahwa pelaksana dari program rumah sehat layak huni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Kawasan Pemukiman. Untuk di tingkat Kecamatan, yang menjadi pelaksana adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta di tingkat Desa/Kelurahan ada aparatnya yang menjadi pelaksana bersama keterlibatan dari masyarakat. Jika banyak pihak yang terlibat menjadi pelaksana dalam program Rumah Sehat Layak Huni, maka jumlah dari pelaksana juga banyak. Begitu juga sebaliknya jika

pihak yang terlibat sedikit maka jumlah pelaksana pun sedikit.

Namun banyak atau sedikitnya pelaksana yang terlibat dalam program Rumah Sehat Layak Huni, tidak menjamin memiliki pengaruh besar terhadap suksesnya pelaksanaan program, yang paling penting adalah para pelaksana tersebut memiliki kemampuan. Karena setiap program tentunya tidak hanya diukur dari segi jumlah atau kuantitas, kemampuan atau kualitas yang dimiliki oleh pelaksana menjadi salah satu faktor yang menentukan baik atau buruknya suatu program. Ketika kemampuan pelaksana program baik, maka program pun akan menjadi baik.

e. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan merupakan proses pengamatan, penentuan standart yang akan dicapai, menilai pelaksanaan kegiatan, dan mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat mencakup penegakan hukum, pertanggung jawaban publik, hubungan dengan lembaga-lembaga perwakilan, dan kepedulian pada etika dalam pemerintahan yang berlaku. Pada umumnya, pengawasan dilakukan oleh pimpinan instansi atau pegawai yang lebih tinggi kedudukannya dari pegawai yang diawasi. Pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan terhadap pegawai yang menjadi bawahannya tidak hanya agar pelaksanaan pekerjaan terfokus pada usaha pencapaian tujuan organisasi. Akan tetapi yang lebih penting yaitu bagaimana seorang bawahan dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selama pembangunan rumah sehat layak huni TKSK lah yang bertanggung jawab dilapangan mulai dari awal pembangunan sampai akhir pembangunan. TKSK juga dipercaya oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang untuk mengelola uang dalam pembangunan mulai dari membelikan bahan material di toko bangunan hingga uang yang digunakan untuk membayar upah pekerja.

Metode pengawasan dilakukan dengan turun ke lapangan secara langsung. Namun hal tersebut tidak dilakukan secara rutin, terutama dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan. Pihak Dinas hanya turun ke lapangan pada saat rumah sudah rampung seratus persen. Penulis melihat bahwa pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan belum maksimal, seharusnya pihak Dinas bisa turun ke lapangan secara rutin untuk melihat apakah program bantuan Rumah Sehat Layak Huni berjalan dengan baik dilapangan.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan kawasan Pemukiman terhadap pelaksanaan program rumah sehat layak huni pada tahun 2018, ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Sehat Layak Huni. Ini dikarenakan selama dalam proses pembangunan dari awal pembangunan sampai selesai TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) lah yang mengawasi di lapangan. Pada saat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang turun lapangan ada ditemukan bangunan rumah yang tidak sesuai dengan ukuran rumah yang telah ditentukan, ada beberapa yang ukurannya lebih besar dari ukuran yang telah ditentukan namun ada juga ukuran rumahnya lebih kecil dari yang telah ditentukan.

2. Faktor-faktor Penghambat Manajemen Pemerintahan dalam

Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni.

Setiap kegiatan manajemen pemerintahan baik yang berada di pusat ataupun di daerah dalam pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tidak selalu berjalan secara optimal. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan kegiatan program bantuan Rumah Sehat Layak Huni tahun 2018 mengalami beberapa hambatan. Terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan nya sebagai berikut:

1. Terbatasnya Penganggaran

Penganggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta diharapkan mendorong percepatan pembangunan. Penganggaran digunakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian tujuan program yang telah ditentukan.

Ketersediaan dana untuk melaksanakan suatu kegiatan baik untuk memenuhi kebutuhan peralatan, fasilitas pengelolaan sekaligus penunjangnya, maupun biaya operasional bagi operator yang melaksanakan kegiatan haruslah terpenuhi. Karena apabila ketersediaan dana/biaya dengan jumlah minim maka akan berdampak kepada kegiatan yang dilakukan kemungkinan besar akan mengalami hambatan sehingga berujung kepada tidak tercapainya target/tujuan yang telah direncanakan. Pembangunan program Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tidak terlepas dari persoalan pendanaan. bisa dikatakan untuk penganggaran dana sangat minim untuk pembangunan rumah. Bahan material di pedalaman tentu harganya berbeda dengan bahan material yang dekat dengan perkotaan. Untuk membeli bahan material tidak memungkinkan dari pedalaman ke kota karena aksesnya yang begitu jauh bahkan

bisa memakan biaya lebih banyak untuk biaya transportasinya, untuk material dibeli di toko terdekat dengan seadanya saja. *Pertama* pencairan dana digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk mendirikan bangunan dulu seperti, batu bata, semen dan besi. *Kedua*, setelah bangunan ini berdiri lalu dana cair kedua ini digunakan untuk membeli seng, paku, plafon dan bahan-bahan lain yang diperlukan. *Ketiga*, di tahap ini dana yang cair digunakan untuk membeli keperluan bahan-bahan lain yang sekiranya masih kurang dan diperlukan. Untuk gaji pekerja itu sendiri dibayar setiap kali dana itu cair.

b. Ketidaktepatan Waktu

pembangunan program Rumah Sehat Layak Huni mengalami kendala dalam ketepatan waktu pembangunan. Waktu yang ditetapkan selama 90 hari kerja atau selama tiga bulan dirasa kurang, karena dalam pembangunannya lebih dari 90 hari kerja. Ini disebabkan apabila terjadi hujan tentu proses pengerjaan rumah dihentikan.

Terlambat datangnya bahan material bangunan sampai ke lokasi pembangunan Rumah Sehat Layak Huni, sehingga para pekerja harus menunggu sampai bahan material bangunan sampai dilokasi dan kendala tersebut mengakibatkan pembangunan Rumah Sehat Layak Huni melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk pengadaan bahan material harus diperhatikan. Tentu jika terjadi keterlambatannya datangnya bahan material bangunan, maka pelaksanaan pembangunan Rumah Sehat Layak Huni dapat berjalan dengan lancar sehingga penyelesaian pembangunan tidak melebihi dari batas waktu yang telah ditetapkan yaitu sembilan puluh hari kerja atau selama tiga bulan.

KESIMPULAN

Manajemen Pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan khususnya untuk Perencanaan dan Pengawasannya masih belum berjalan dengan maksimal, ini dikarenakan program yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin yang belum atau sudah memiliki rumah namun belum layak huni ini tidak tepat sasaran. Dinas PUPR tidak selektif dalam memverifikasi data masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dan layak untuk menerima program tersebut. Dan untuk pengawasannya hanya dilakukan setelah pembangunan rumah rampung seratus persen sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan tidak begitu mengetahui kejadian di lapangan. Karna selama proses dilapangan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) lah yang bertugas mengawasi di lapangan dan sesekali di bantu oleh Kepala Desa. Itu sebabnya dilapangan masih ditemukan penyimpangan yang terjadi. Faktor Penghambat Manajemen Pemerintahan dalam Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yaitu;

a. Terbatasnya Penganggaran, dengan minimnya penganggaran ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Sehat Layak Huni apalagi di desa-desa terpencil, ini karena bahan material di pedesaan terpencil jauh lebih mahal dibandingkan dengan desa yang dekat dengan perkotaan. Jadi dana yang sudah di anggarkan dirasa kurang cukup untuk proses pembangunan.

b. Ketidaktepatan Waktu, Dalam melaksanakan pembangunan program bantuan Rumah Sehat Layak Huni telah ditetapkan batas waktu selama sembilan puluh hari kerja atau selama tiga bulan dirasa masih kurang. Ini disebabkan apabila terjadi hujan terus menerus tentu proses pengerjaan rumah dihentikan. Penghambat lainnya karena terlambat datangnya bahan

material sehingga ini memakan waktu yang lebih lama.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Manajemen Pemerintahan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Dalam Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Di Kecamatan Ukui Tahun 2018. Maka disarankan kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang lebih baik lagi dalam manajemen Pemerintahan nya baik itu *Planning, Organizing, Coordinating, Actuating, dan Controlling* agar program bantuan RSLH bisa lebih tepat sasaran kepada orang yang memang layak untuk menerima program ini. Kepada kepala Desa, RT, dan RW diharapkan dalam proses pendataan bisa lebih selektif lagi dan memberikan data warga miskin sesuai dengan yang ada di lapangan agar pembangunan program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Arsyad, Loncolin. 2002 Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Charles O, Jones. Pengantar Kebijakan Publik Jakarta: Rajawali
- Creswell, J. W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan, mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dawis Dkk, 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Pekanbaru: UNRI.
- DjuROTO, Totok. 2004. Manajemen Penerbitan Pers. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- George R. Terry dan Leslie W. Rue. 2006. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Askara.
- George R. Terry. Prinsip-Prinsip Manajemn. Jakarta: PT Bumi Askara Istianto.

- Bambang, 2011. Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nawawi, Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Siagian, Sondang. 1992. *Fungsi Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Askara
- Suradinata, Ermaya. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: CV. Ramadhan Bandung.

b. Jurnal Jurnal

- Muhammad Irfan. Kebijakan Rumah Layak Huni Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Kemiskinan. Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017.
- Bambang Winarno. Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung. Vol. 6 No. 1 (2018).
- Herry Suharyadi. Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung Tahun 2015. Vol. 2 No. 2 – Oktober 2016.
- Egi Syahyudi Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah((UMKM) Di Kota Pekanbaru. Vol. 5 No. 1 – April 2018.

c. Peraturan Perundang – Undangan

1. UUD 1945 pada Pasal 28H Ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
2. Undang Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam Undang Undang tersebut yang dimaksud dengan “Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni.

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan.
4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

d. Wawancara

1. Wawancara bersama Bapak T, Said Haryantomas Selaku Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (Selasa, 20 Oktober 2020).
2. Wawancara bersama Bapak Sukamat Selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Ukui (Selasa, 17 November 2020)
3. Wawancara bersama Bapak Taryam dan Bapak Kusmawan Selaku Kepala Desa (Senin, 16 November 2020).
4. Wawancara bersama Bapak Hadi Selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Senin, 16 November 2020)
5. Wawancara bersama Masyarakat Bapak Injil, Bapak Irep, Bapak Haris.